

Diskusi #20TAHUNREFORMASI

CATATAN PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM

Jum'at, 25 Mei 2018 – Pukul 14.30 – 17.45 WIB
Bakoel Koffie Cikini

Bersama:



Dr. Enny Sri Hartati

Direktur Eksekutif INDEF

"Potret Ekonomi dan Kebijakan Fiskal
Sektor Sumberdaya Alam"



Fabby Tumiwa

Direktur Eksekutif IESR

"Perubahan Iklim dan Energi
Berkelanjutan"



Maryati Abdullah

Koordinator Nasional PWYP Indonesia

"Catatan #20TahunReformasi Pengelolaan
Sektor Migas dan Pertambangan"



Tama Satrya Langkun

Koordinator Divisi HMP ICW

"*Quo Vadis* Pamberantasan Korupsi
Sektor Sumberdaya Alam"



Ridaya Laode Ngkowe

**Aktivist '98 - Pemerhati
SDA dan Lingkungan**

"Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Pembangunan Berkelanjutan"



Host

Aryanto Nugroho

**Program Manager
PWYP Indonesia**

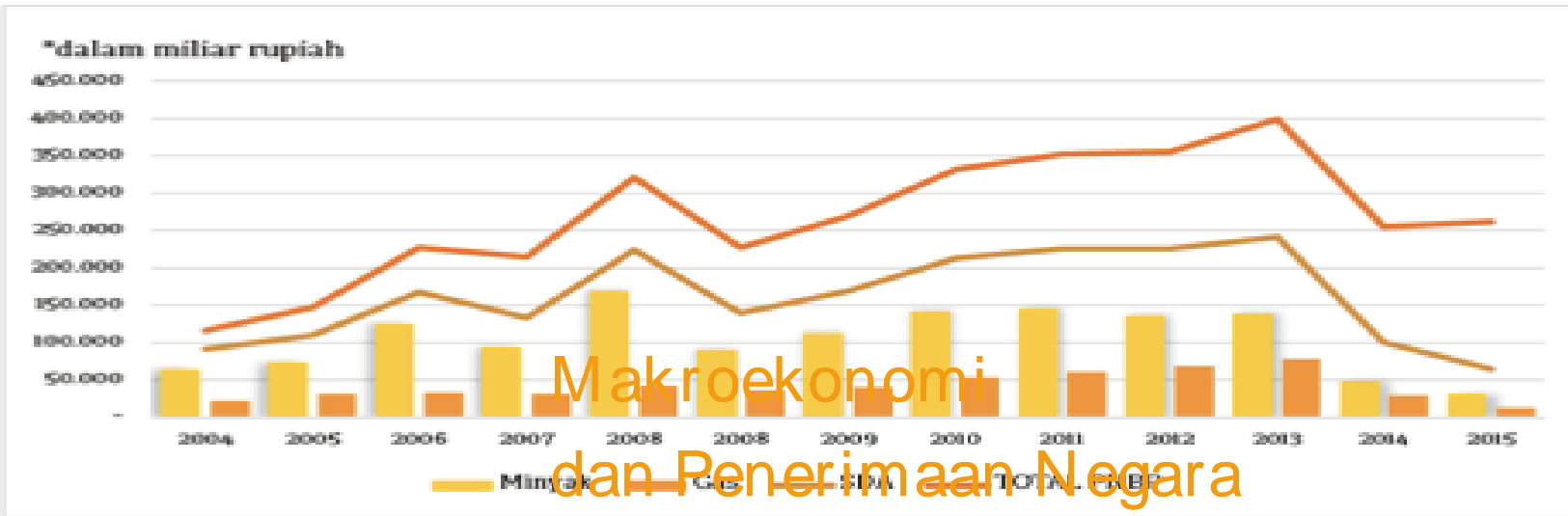
Makro Ekonomi dan Penerimaan Negara

#20TahunReformasi

Catatan Sektor Migas dan Pertambangan

Makro Ekonomi dan Penerimaan Negara

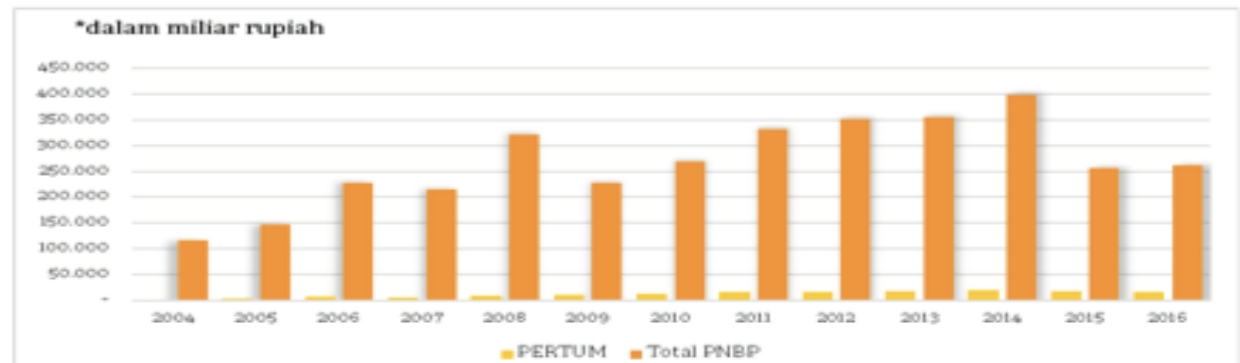
Gambar 1. Kontribusi PNBPN Migas terhadap PNBPN Sektor SDA dan PNBPN Total (2004 – 2015)



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP, 2004 – 2015) & BPS

Gambar 2. Kontribusi PNBPN Pertambangan Umum terhadap PNBPN Total (2004 – 2016)

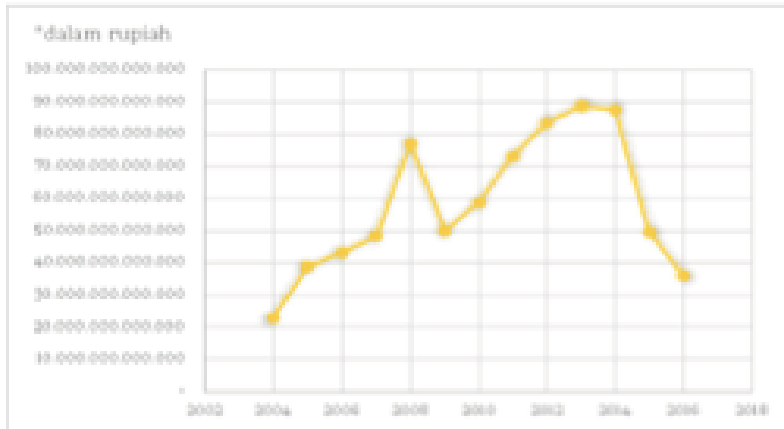
PNBPN Migas & Pertambangan



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP, 2004 – 2016)

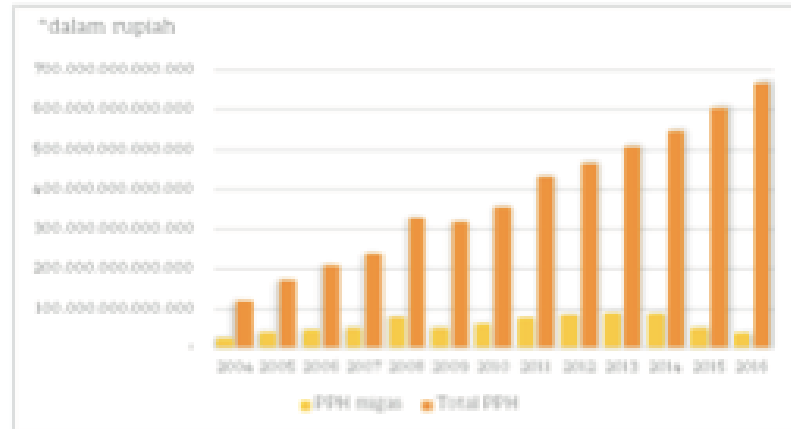
Pajak Penghasilan (PPH) Migas

Gambar 5. Pajak Penghasilan Migas (2004 - 2016)



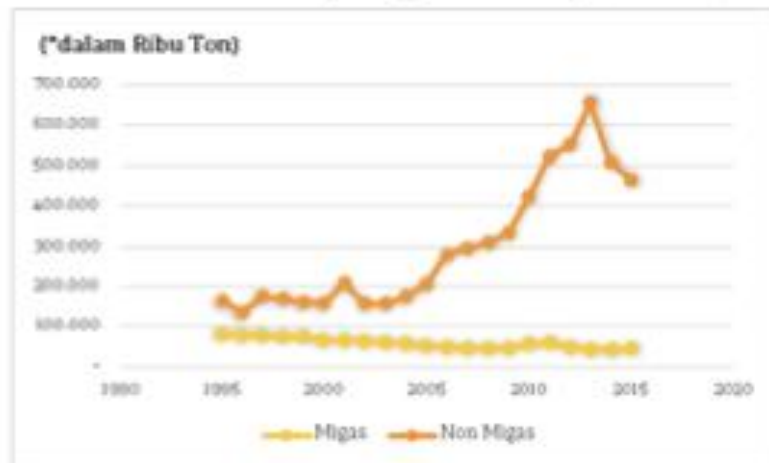
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP, 2004 - 2016)

Gambar 6. Pajak Penghasilan Migas VS Total PPh (2004 - 2016)

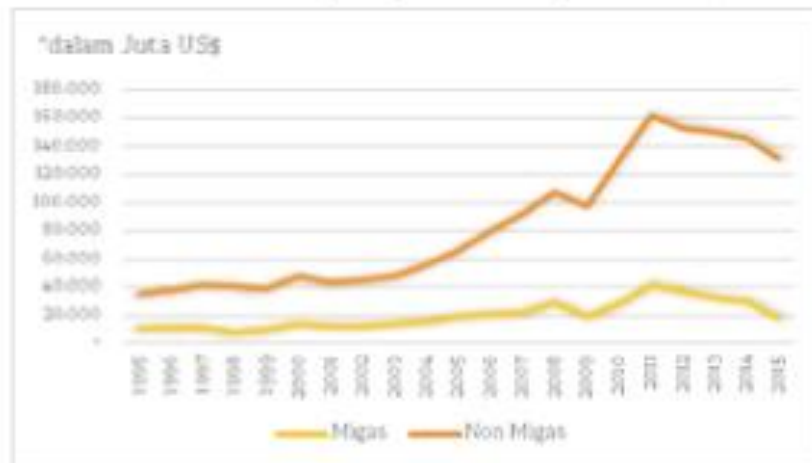


Ekspor Migas

Gambar 7. Volume Ekspor Migas dan Non-Migas (1995 - 2015)



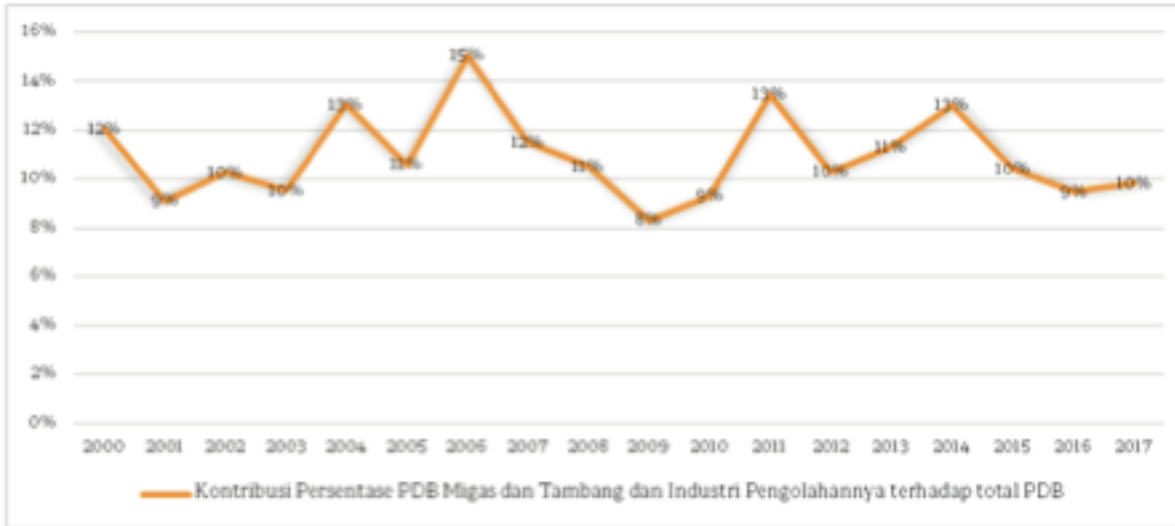
Gambar 8. Nilai Ekspor Migas dan Non-Migas (1995 - 2015)



Sumber : badan Pusat Statistik, 2018.

Gambar 10. Persentase Kontribusi PDB Sektor Migas dan Tambang (Serta Industri Pengolahan Turunannya)

Terhadap Total PDB (Harga Berlaku) Tahun 2000 – 2017

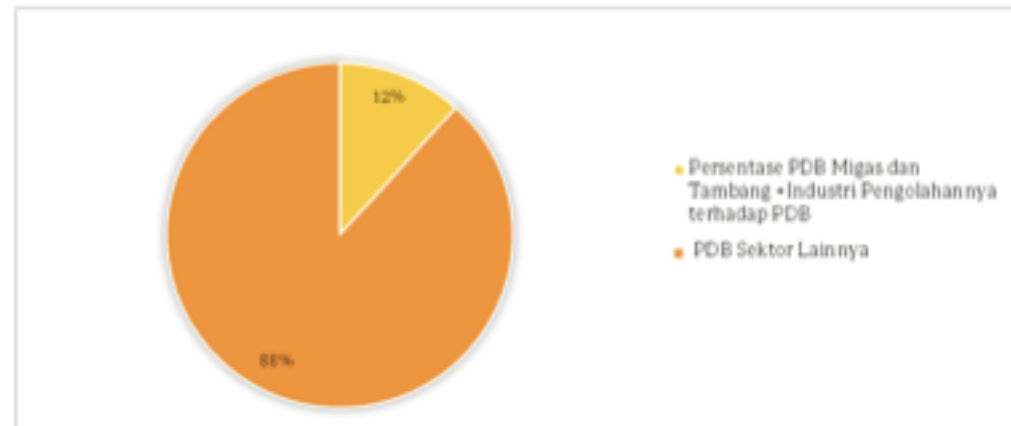


Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah (PWYP Indonesia, 2018)

PDB Sektor Migas-
Tambang & Industri
Pengolahan
Turunannya

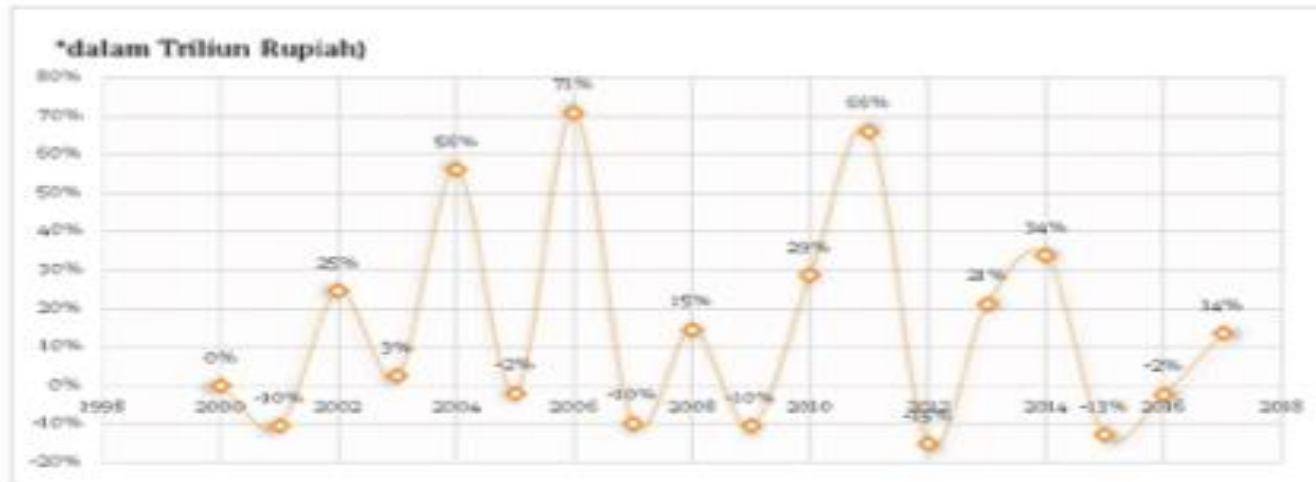
Gambar 11. Persentase Perbandingan PDB Migas – Pertambangan Umum dan

Industri Pengolahannya dengan PDB Sektor Lainnya (2000 – 2017)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah (PWYP Indonesia, 2018)

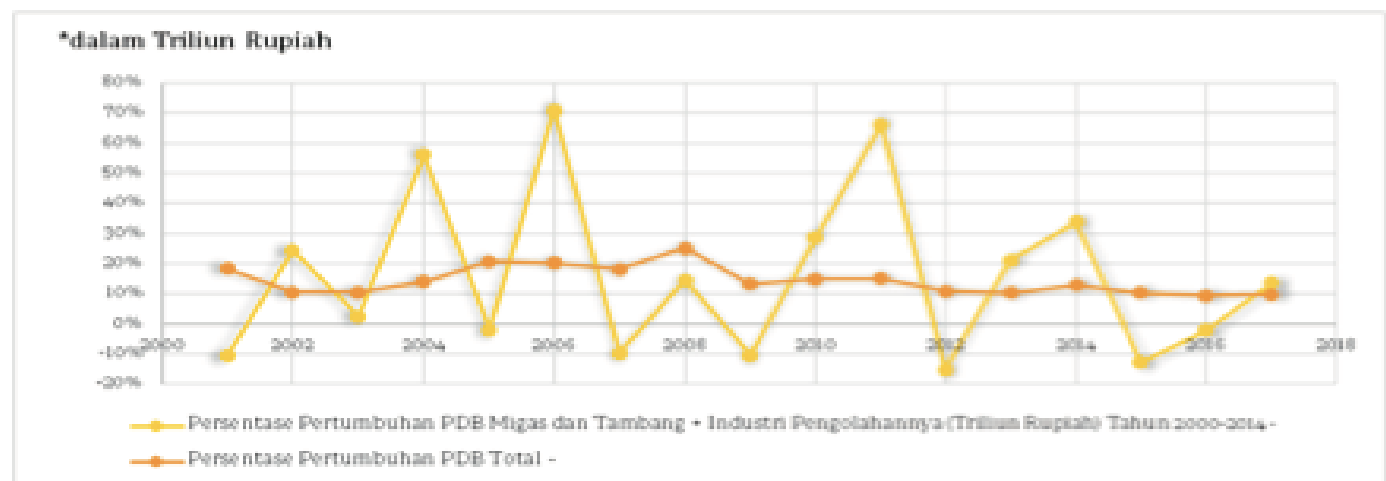
Gambar 13. Persentase Pertumbuhan PDB Migas – Tambang dan Industri Pengolahan Turunannya (Triliun Rupiah) : 2000 – 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah (PWYP Indonesia, 2018)

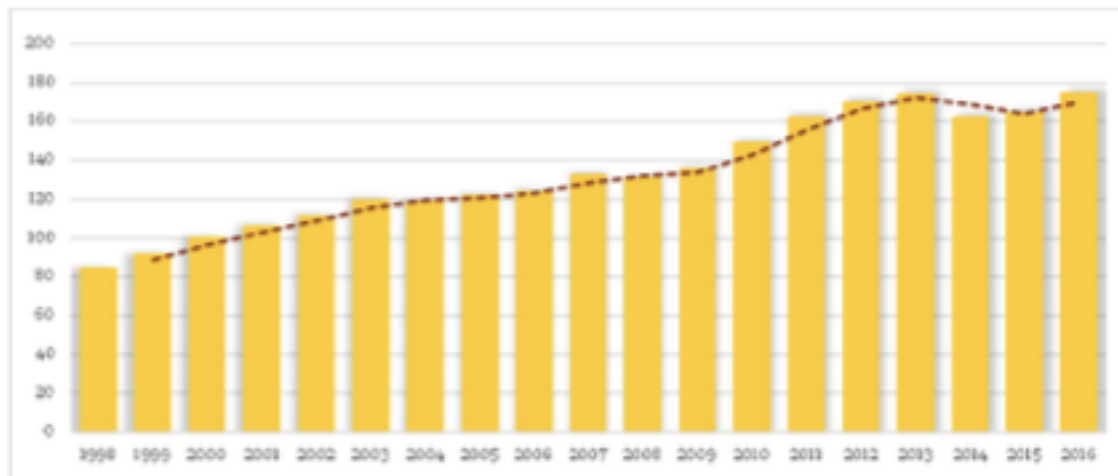
Pertumbuhan
PDB Sektor
Migas &
Tambang

Gambar 14. Perbandingan Persentase Pertumbuhan PDB Total dengan PDB Migas-Tambang dan Industri Pengolahan Turunannya (Harga Beraku) : Tahun 2000 – 2017



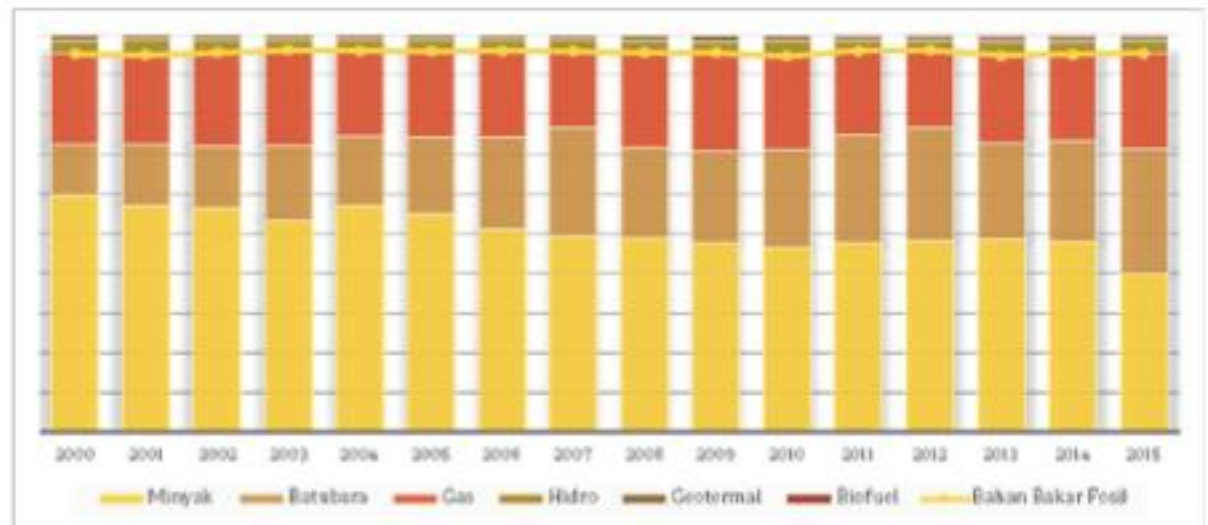
Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah (PWYP Indonesia, 2018)

Gambar. Konsumsi Energi Indonesia (dalam millions ton oil equivalent-MTOE)



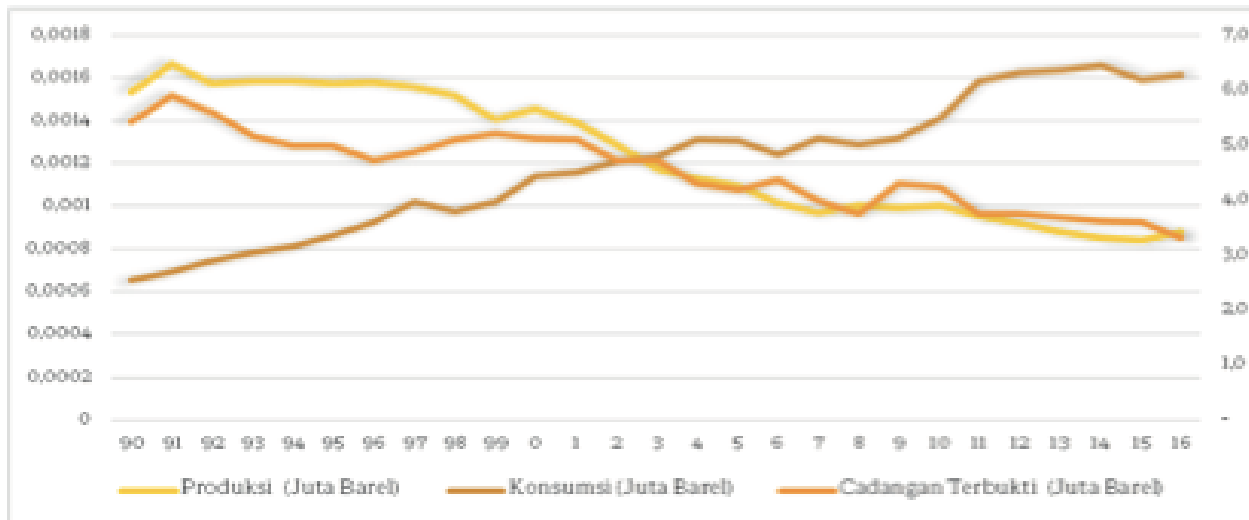
Sumber: BP Statistical Review, 2017

Gambar 2. Bauran Energi Primer di Indonesia (dalam %)



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016

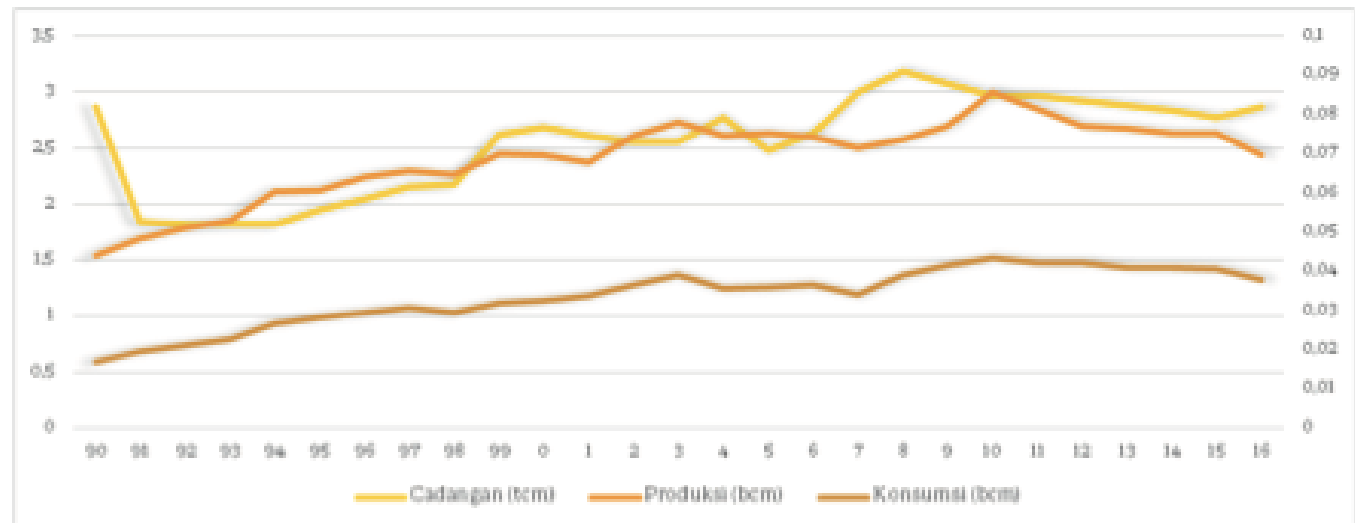
Gambar . Konsumsi, cadangan dan produksi minyak nasional (1990 – 2016)



Konsumsi, Cadangan dan Produksi Migas Nasional

Sumber: BP Statistical Review 2017

Gambar . Konsumsi, Cadangan dan Produksi Gas Bumi Nasional (1990 – 2016)



Sumber: BP Statistical Review, 2017

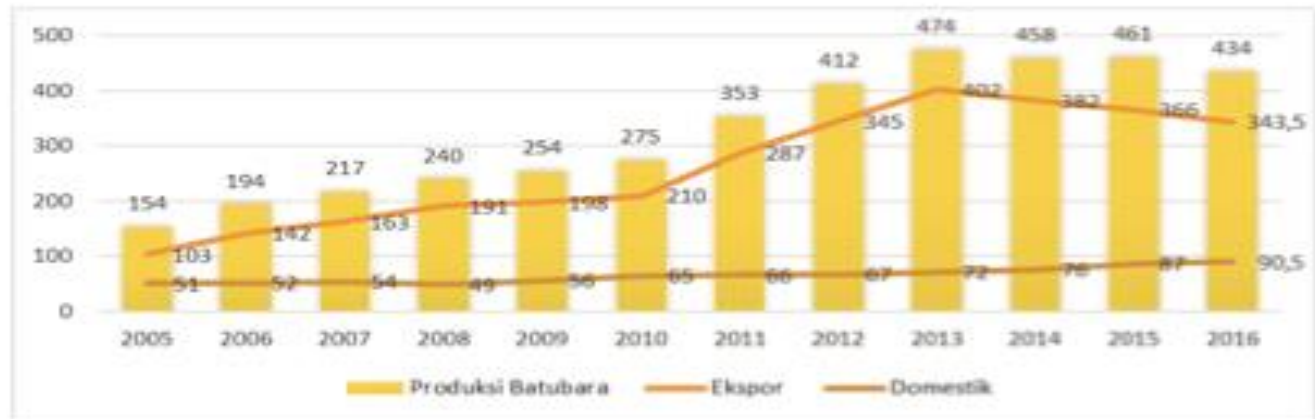
Produksi dan Sumberdaya Cadangan Batubara Indonesia

Gambar . Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia (dalam Juta Ton)



Sumber: Badan Geologi 2016

Gambar . Volume Produksi Batubara: Ekspor VS Domestik (dalam Juta Ton)



Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Minerba (2015-2016), Kementerian ESDM & APBI (2016)

Dinamika Otonomi Daerah Sektor SDA Era Reformasi

Rezim '22

- Demokrasi & Demokratisasi
- Titik berat otonomi di Kab/Kota
- Sistem otonomi luas dan nyata
- No mandate without founding (kewenangan disertai pembiayaan)
- Penguatan rakyat melalui DPRD
- Kewenangan daerah untuk menerbitkan izin sumberdaya alam selain Migas
- Era Dimulai Eksploitasi SDA oleh Daerah

UU 22/2001

UU 22/1999

UU 25/1999

- Desentralisasi Fiskal
- Daerah berhak atas sumber penerimaan dari pemerintah pusat, berupa DBH Pajak, DBH SDA, DAU & DAK
- Kesenjangan dan konflik antar pusat-daerah, daerah-daerah terkait SDA

Rezim '32

- Pembentukan daerah dan kawasan khusus
- Pembagian urusan pemerintahan (Pusat-Daerah, Wajib – Pilihan)
- Penguatan posisi gubernur
- Penguatan rakyat melalui Pilkada Langsung
- Kewenangan daerah untuk menerbitkan izin sumberdaya alam selain Migas
- Booming Izin Tambang di Daerah
- Praktik politik rente semakin marak dalam sektor SDA
- Moratorium Izin Tambang Pasca UU 4/2009

UU 4/2009

UU 32/2004

UU 33/2004

Rezim '23

- Pemindahan kewenangan pemberian izin pertambangan dari Kabupaten ke Provinsi (dan Pusat)
- Kewenangan pengawasan di Pusat
- Transisi P3D yang problematis

Revisi UU 4/2009

Revisi UU 22/2001

UU 23/2014

Revisi UU 33/2004

- Revisi UU Pemda belum disertai dengan revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat - Daerah

Perkembangan IUP di Indonesia

1 Mei 2011 Rekonsiliasi CnC Tahap I	IUP C&C	6.004	Korsup Minerba KPK 12 + 19 Provinsi Penataan IUP CnC Penerbitan Permen ESDM No 43/2015	IUP C&C	6.125
	IUP NON C&C	4.913		IUP NON C&C	2.155
	Total (Des 2013)	10.917		Total (Feb 2018)	8.280

- 2011

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

Era Booming Izin
Tambang

Per 1 Juli 2011

IUP C&C	3.778
IUP NON C&C	5.884
Total	9.662

Rekonsiliasi CnC Tahap
Okt-Nov 2012

IUP C&C (I-XVIII)	6.353
IUP NON C&C	3.687
Total	10.040

29 Juli 2016
Pengumuman CNC
XVIII : 121 IUP

Nov 2017, Ditjen Minerba, Ditjen AHU, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Daglu, KPK dan Ombudsman melakukan pemblokiran pelayanan publik terhadap 2.509 IUP berstatus non C&C

Feb 2018, Ditjen Minerba, Ditjen AHU, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Daglu, KPK dan Ombudsman melakukan pemblokiran pelayanan publik terhadap 2.011 IUP yang SK-nya berakhir pada Desember 2017

Sumber : ESDM, Diolah

Gambar 25. Nilai DBH SDA Migas – Tambang (2004 – 2016)



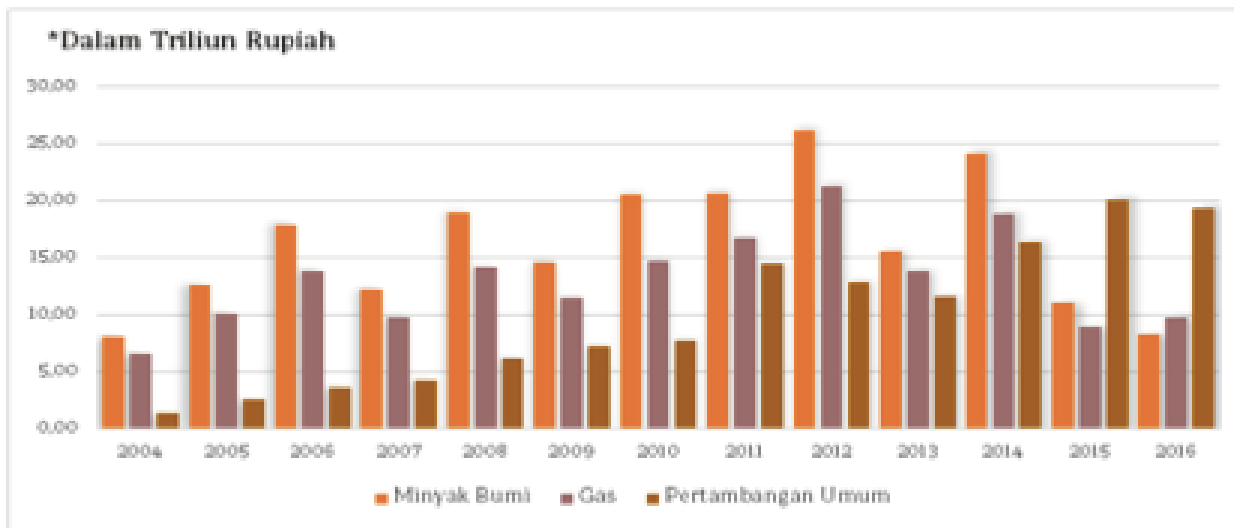
Sumber: LKPP Tahun 2004-2016, Diolah (PWYP Indonesia, 2018)

Gambar 24. Persentase DBH SDA Migas – Tambang VS DBH SDA Lainnya (2004 – 2016)



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Diolah (PWYP Indonesia, 2014)

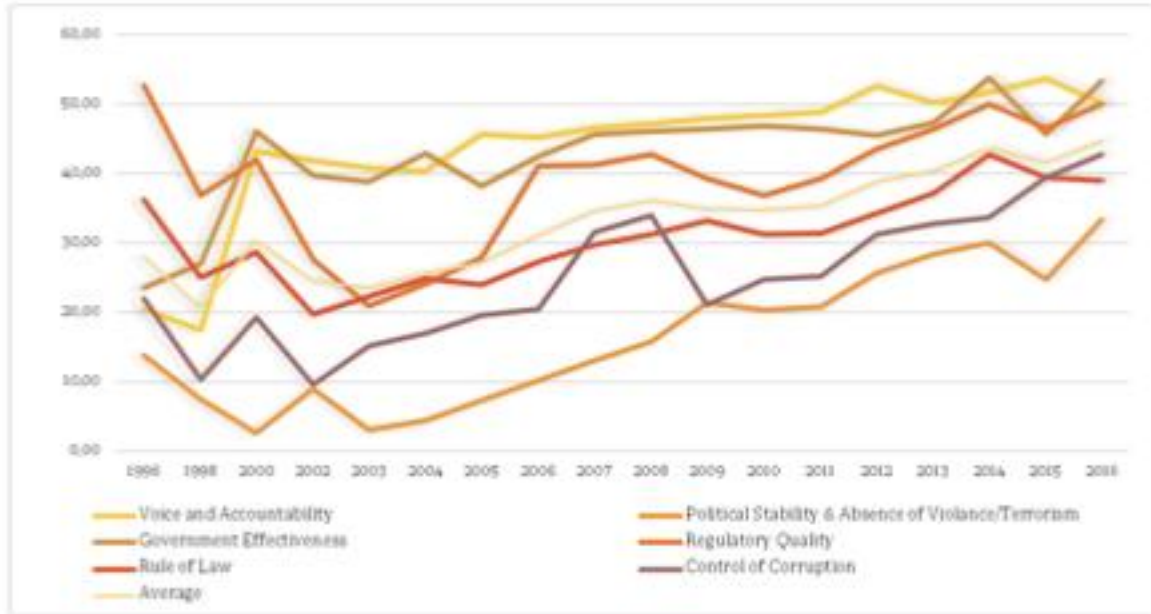
Gambar 27. Komposisi nilai DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pertambangan Umum (2004 – 2016)



Sumber: LKPP Tahun 2004 – 2016, Diolah (PWYP Indonesia, 2018)

Dana Bagi Hasil Sektor Migas – Pertambangan

Gambar 28. Indikator Tata Kelola Pemerintahan Indonesia : 1996 – 2016



Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia

Sumber : Worldwide Governance Indicators (WGI), 2018

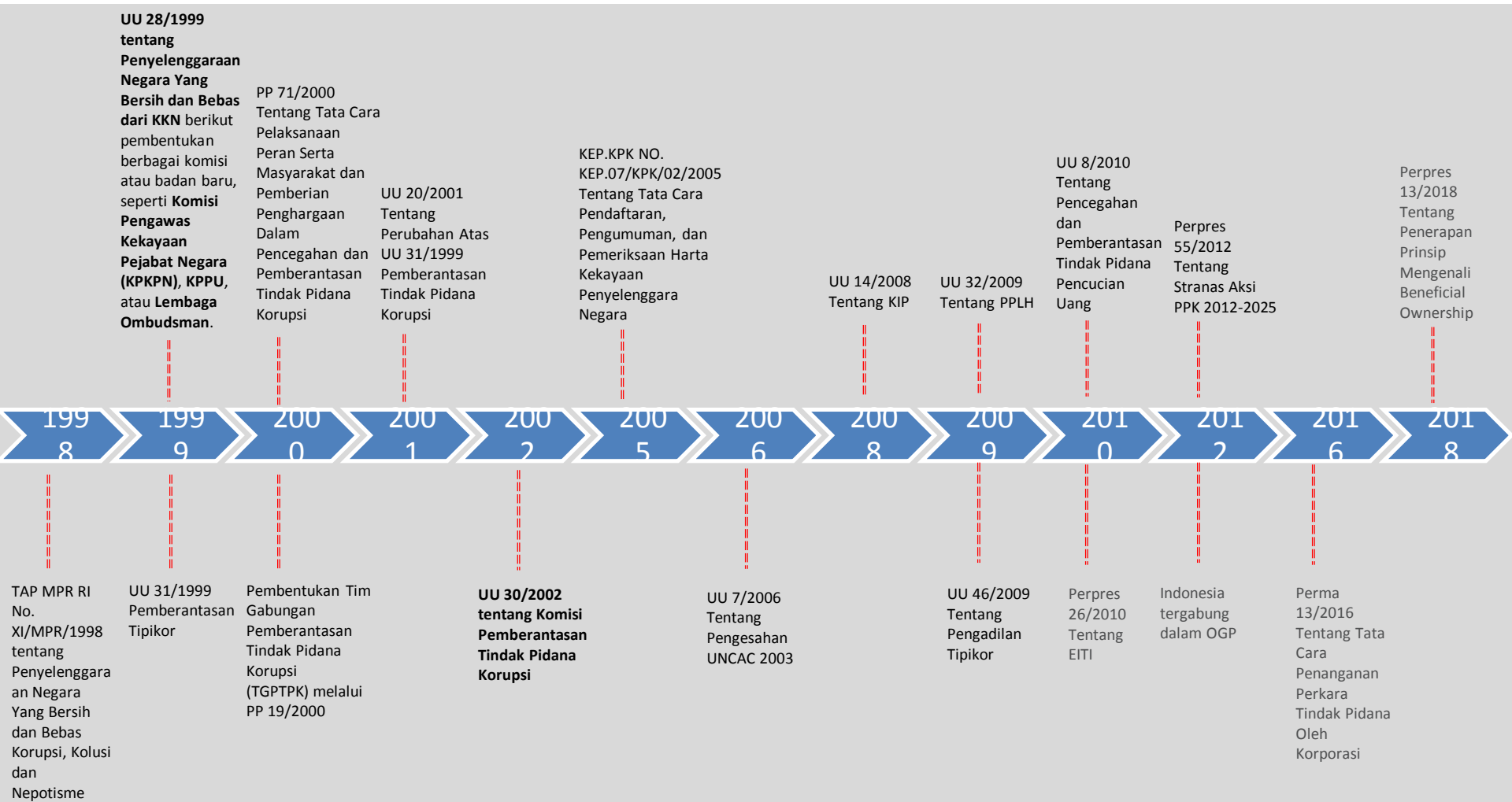
Gambar 29. Skor dan Ranking Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia (1998 – 2017)



Sumber : Corruption Perception Index, Transparency International (1998 – 2017)

Indeks Persepsi Korupsi

Pemberantasan Korupsi Dan Inisiatif Transparansi Sektor Ekstraktif



Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

SKANDAL BP MIGAS

Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, ditangkap KPK pada 13 Agustus 2013 karena menerima suap dari PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia sebesar 900.000 dollar AS dan 200.000 dollar Singapura



RUDI RUBIANDINI

Rudi Rubiandini divonis 7 Tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta

SKANDAL MENTERI ESDM

KPK menetapkan Mantan Menteri ESDM, Jero Wacik, sebagai tersangka pada 3 September 2014



JERO WACIK

Kasus penyelewengan pengadaan proyek dan dana operasional menteri

Divonis 4 Tahun Penjara.

SKANDAL GUBERNUR

Mantan Gubernur Sultra, Nur Alam, divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti menyalahgunakan wewenang dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan IUP Eksplorasi, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB)



NUR ALAM

SKANDAL BUPATI

Bupati Bangkalan, Fuad Amin, divonis 13 Tahun oleh MA karena terbukti menerima uang hasil tindak pidana korupsi dari PT Media Karya Sentosa untuk memuluskan pembelian gas alam di Blok Poleng, Bangkalan, Madura s



FUAD AMIN

Gambar 32. Sasaran Utama Koordinasi dan Supervisi KPK di Sektor Pertambangan



Sumber : PWYP Indonesia (2017)

#20TahunReformasi

#BijakKelolaSDA